

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu sarana dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dalam pembangunan merupakan sebuah langkah perubahan yang dilakukan pemerintah untuk proses perubahan di masa yang akan datang agar lebih baik dibandingkan di masa sekarang. Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur masih belum terlaksana secara merata khususnya di wilayah pedesaan sehingga terjadinya kesenjangan kesejahteraan antara wilayah kota dengan desa, kesenjangan antara wilayah kota dengan pedesaan disebabkan karena pelaksanaan pembangunan lebih dominan difokuskan di wilayah perkotaan. Akibat dari pembiasaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah timbulnya daerah-daerah yang tertinggal sehingga sumber daya manusia di wilayah tertinggal tersebut tidak berkembang dengan baik. Pemerintah membuat suatu kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk menanggulangi Kesenjangan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan otonomi daerah secara efektif telah dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2001. Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah dan dilakukan revisi dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan undang-undang No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan pemerintah keuangan daerah (Pamudi, 2008). Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 diatur tentang daerah memiliki wewenang tersendiri untuk mengatur segala sesuatu kebutuhan rumah tangga daerah di setiap wilayah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan tingkat kemandirian yang sangat tinggi, suatu daerah bisa dikatakan mandiri jika meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) akan

berdampak pada tingkat pembangunan sumberdaya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Ulupi, 2015).

Kebijakan otonomi daerah yang dibuat oleh pemerintah merupakan sebuah kebijakan dan wewenang daerah, otonomi daerah dilakukan untuk mengelola keuangan daerah serta kebutuhan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat secara mandiri dengan meminimalisir campur tangan dari pemerintah pusat, semakin besar wewenang atau tanggung jawab yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar dana yang dibutuhkan oleh daerah untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga daerah. Dengan meningkatnya pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sehingga pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendapatan daerah yang terbesar dengan didukung dana perimbangan oleh pemerintah pusat dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah dapat diemban oleh pemerintah daerah setempat. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh suatu daerah maka daerah tersebut akan mampu mengurus segala kebutuhan rumah tangga daerah tersebut yang sesuai dengan harapan masyarakat. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat, penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk melakukan pendanaan disisi belanja rutin. Peningkatan pelayanan publik dilakukan agar berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat serta akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pendapatan Asli Daerah mampu membiayai belanja modal hanya sekitar 20%, maka dari itu dibutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang berfungsi sebagai penopang kebutuhan belanja daerah. Dana perimbangan yang bersumber dari APBN pemerintah pusat

yang dialokasikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, pemerintah dapat menggunakan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah guna pembiayaan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga dampak jangka panjang adalah peningkatan pada kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, serta menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Putara,2015).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur dalam mengetahui taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam peningkatan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dalam kebijakan strategi pembangunan nasional, kualitas sumberdaya manusia di dalam suatu wilayah memiliki peran penting dalam penentuan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayah daerah.

Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi secara kumulatif sebesar 5,22% dan di lingkup Pulau Jawa Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ke dua setelah Banten, Provinsi Jawa Timur pertumbuhannya mencapai 0,52 poin dibandingkan dengan pertumbuhan nasional hanya sebesar 4,7%, Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap 33 Provinsi (Nasional) sebesar 14,51 persen, sehingga Provinsi Jawa Timur salah satu bagian provinsi terpenting di Indonesia. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang besar, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebanyak 38,847,561 jiwa dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2014-2015 sebanyak 0,61%, sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur berpotensi besar untuk diberdayakan sumber (BPS Provinsi Jawa Timur, 2015).

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dari 38 Kabupaten/Kota memberikan sumbangan pada tahun 2014 sumbangan PDRB sebesar 39,90% dibandingkan dengan PDRB nasional sebesar 41,80% selisih PDRB Jawa Timur dengan nasional sebesar 1,9%. Kondisi tersebut menggambarkan sebuah indikasi bahwa wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan, dan selisih PDRB Jawa Timur dengan nasional tidak terlalu banyak hanya 1,9% (BPS Provinsi Jawa Timur, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD adalah satu kewenangan pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33/2004). Pendapatan Asli Daerah adalah suatu indikator dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah kepada pemerintahan pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan kemandirian fiskal di setiap daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah sebuah indikator yang menunjukkan seberapa jauh daerah tersebut dapat mandiri dalam pembiayaan kebutuhan daerah tersebut, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diterima daerah.

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia akan tercapai pada saat produktivitas ekonomi meningkat. Pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas sumber daya manusia tidak akan bertahan lama karena pembangunan sumberdaya manusia menjadi suatu komponen yang sangat penting dalam kebijakan pembangunan nasional (Firda,2014).

Indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2014 mengalami peningkatan sebesar 66,06 dan pada tahun 2014 indeks pembangunan manusia sebesar 68,14. Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 menduduki

peringkat 19 di tingkat Nasional, pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur mendapat peringkat 18 di tingkat Nasional, Pembangunan sumberdaya manusia menjadi hal yang penting untuk strategi kebijakan pembangunan nasional. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berupa DAU, DAK, dan DBH pemerintah daerah dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Kualitas sumberdaya manusia ikut serta dalam keberhasilan pengelolaan pembangunan di setiap wilayah, karena indeks pembangunan manusia merupakan indikator keberhasilan suatu daerah dalam pencapaian pembangunan daerah, oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul **“KONTRIBUSI PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus segala kebutuhan rumah tangga daerah secara mandiri maka dibutuhkan pembiayaan dana dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga daerah secara besar. Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka kemandirian daerah akan tercapai sehingga pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur dapat dioptimalkan dengan baik. Hasil pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah variabel PAD menjadi variabel dominan yang mempengaruhi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui apakah variabel PAD sebagai variabel dominan yang berpengaruh dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat diperoleh beberapa manfaat bagi peneliti maupun pihak pembaca antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran seberapa jauh pengaruh kontribusi pendapatan daerah terhadap peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur.
2. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain guna mengembangkan dan menambah pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.